



#### 70 Aset Dikerjasamakan

# Pemprov Bali Mesti Transparan

SEBANYAK 70 aset Pemprov Bali telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Namun, Kepala Biro Aset Pemprov Bali Drs. Ketut Adiarsa, M.H. tidak bisa membeberkan dengan detail lantaran harus seizin Gubernur Bali. "Kalau dokumen itu harus izin dari pimpinan, Pak Gubernur. Tidak bisa kita (memberikan - red),' ujarnya, beberapa hari lalu.

Ketut Adiarsa mengatakan, pendataan aset sampai saat ini terus berjalan untuk mengetahui bagaimana potensi dari aset-aset tersebut. Kalau kebutuhan aset untuk kepentingan pelayanan sudah tercukupi, maka akan didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan. Baik dengan sewa maupun dikerjasamakan, dengan tetap mengacu tata ruang.

Salah satunya, menyewakan tanah aset Pemprov di depan gedung Bank Indonesia pada pihak ketiga sejak 2014. Aset yang disebut tidak lagi digunakan untuk kepentingan SKPD tersebut kurang lebih seluas 20 are. "Kadang-kadang kalau aset dibiarkan tidak dimanfaatkan kan potensi penyerobotan, akhirnya kita optimalkan dengan tetap mengedepankan konsep tata ru-ang," ujarnya. Ketua Pansus Aset DPRD

Provinsi Bali I Wayan Gunawan mengakui bila optimalisasi bisa berarti penyewaan aset secara besar-besaran. Dengan catatan, tetap selektif, efisien, dan berhasil guna. "Aset yang posisinya tidak strategis tetapi justru membebani anggaran, itu kan bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga justru menekan biaya untuk perawatan, pemeliharaan, begitu uga dalam konteks efisiensi kerja birokrasi. Yang jelas memang dalam konteks kerja sama itu harus ada keterbukaan, transparansi, pertanggungjawaban," ujarnya. Hal. 23

Dapat Sorotan



PIHAK KETIGA - Tanah Pemprov Bali yang dulunya hijau kini "ditanami" beton karena dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Edisi : Rabu, 13 Mai 2015

Hal





sambungan -- .

#### **Dapat Sorotan**

#### Dari Hal. 1

Penyewaan atau pengerjasamaan aset Pemprov Bali sering mendapat sorotan. Bahkan, pengelolaan aset Pemprov Bali khususnya yang berupa tanah selama ini terus menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bali. Misalnya menyangkut harga sewa aset yang masih rendah dari

harga pasar.

"Mestinya pengelolaan aset daerah jelas, transparan dan akuntabel, jangan ditutup-tutupi. Jangan sampai aset terkesan diobral untuk oknum tertentu," kata praktisi dan pengamat ekonomi Mangku Wayan Gede Suyatartha, Selasa (12/5) kemarin.

Ia menyayangkan selama ini pengelolaan aset pemprov belum begitu transparan. Publik tidak tahu di mana saja aset yang disewakan, siapa penyewanya dan berapa nilainya, termasuk bagaimana juga pola kerja sama dengan pihak ketiga serta siapa saja yang bisa menyewa aset tersebut. "Mestinya dibuka siapa saja yang menyewa aset pemprov, berapa harga sewanya, dan siapa saja masyarakat yang sudah menyewa," kata Suyatartha yang juga Ketua DPD LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Provinsi Bali itu.

Ia juga meminta Pansus

Aset DPRD Bali saat ini tidak sekadar mendata aset yang ada, tetapi mesti memberi masukan dan solusi untuk perbaikan tata kelola aset. Jangan sampai Pansus Aset memiliki agenda dan kepentingan sendiri mendata aset untuk kepentingan pihak tertentu atau malah mereka ikut menyewa dan menguasai aset dengan harga murah. "Pejabat, keluarga pejabat dan anggota Dewan jangan ingin ikut mengelola aset yang ada. Aset ini bukan milik pribadi, bukan warisan kepala daerah, ini milik negara," tandasnya

Secara terpisah, kalangan DPRD Bali juga mengingatkan agar pengelolaan dan penyewaan aset Pemprov Bali dilakukan secara transparan. "Kami minta inventarisasi dan data aset dibuat online agar ada transparansi dan kami di Dewan serta publik bisa ikut mengawasi dan tahu datanya," kata anggota Komisi I DPRD Bali Ni Made Sumiati.

Ia pun mendesak pemprov agar membentuk semacam Tim Khusus yang secara spesifik menangani persoalan aset agar datanya valid. "Kalau ada data valid, masalah yang ada cepat bisa ditangangi. Jangan seperti sekarang, keberadaan aset ini ibarat terselubung," pungkas kader PDI-P asal Karangasem itu. (kmb32/kmb29)

Edisi : Rabu, 13 Mei 2015

Hal

2





#### Kasus Korupsi Dana BOS SMPN 1 Nusa Penida

# Kasek dan Bendahara Divonis 1,5 Tahun

Denpasar (Bali Post)

Vonis yang dijatuhkan kepada Kepala SMPN 1 Nusa Penida I Wayan Sutama dan Bendahara BOS 2011 Ida Bagus Darma Putra jauh merosot dari tuntutan jaksa. Jaksa penuntut umum (JPU) sebelumnya menuntut kedua terdakwa kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masing-masing empat tahun dan 3,5 tahun. Namun, Selasa (12/5) kemarin, keduanya divonis bersalah dan dihukum 1,5 tahun.

Selain itu, majelis hakim tipikor pimpinan Early Sulistyorini juga tidak membebankan uang pengganti sebagaimana kerugian negara yang dituntutkan jaksa. Dalam amar putusan, kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sesuai dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Di samping hukuman fisik, terdakwa juga dijatuhi hukuman denda Rp 50 juta subsider dua bulan penjara.

Sebelumnya, terdakwa Sutama diminta mengganti kerugian negara sebesar Rp Rp 496.172.364 dan Darma Putra sebesar Rp 187.623.518. Namun dalam putusannya, majelis hakim tidak sependapat dengan hasil audit BPKP Wilayah Bali terkait perhitungan kerugian negara. Menurut majelis hakim, seluruh dana BOS digunakan untuk kepentingan sekolah, namun di luar peruntukan yang ditentukan. Selain itu, seluruh dana BOS tidak pernah digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.

Atas putusan itu, JPU I Dewa Mertayasa dan kuasa hukum terdakwa, Gede Bina dkk. menyatakan pikir-pikir.

Korupsi Kades Pesinggahan

Sementara itu, Kades Pesinggahan Wayan Murja yang didakwa korupsi pembangunan balai subak dan palinggih dituntut hukuman penjara selama tiga tahun. Selain itu, JPU A.A. Gede Putra di depan majelis hakim pimpinan Dewa Suardita menuntut terdakwa dengan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan, membayar uang pengganti Rp 189 juta, subsider setahun penjara. Atas tuntutan itu, terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Made Suardika, akan mengajukan pembelaan dalam sidang pekan depan (kmb37)

Edisi : Pabu, 13 Mci 2015

Hal : <u>3</u>







# Pemanfaatan Eks RSUD Bangli Pemkab Rencanakan Saling Ibah Aset

Bangli (Bali Post)-

Rencana pemanfaatan gedung eks Rumah Sakit Umum (RSU) Bangli oleh pemerintah daerah hingga saat ini masih bergulir. Terkait adanya rencana pemerintah Provinsi Bali untuk memanfaatkan bangunan itu sebagai rumah sakit rehabilitasi narkoba, kini pemerintah daerah kembali membuat rencana untuk saling ibah aset antara gedung eks Rumah Sakit Umum Bangli dengan gedung RSUD Bangli.

Kepala Bagian Umum Setda Bangli I Made Mahindra Putra, Selasa (12/5) kemarin menjelaskan pemerintah Provinsi Bali tetap merencanakan pemanfaatan gedung eks RSUD Bangli sebagai Rumah Sakit Rehabilitasi Narkoba. Adanya hal itu, disinyalir akan sedikit menghambat rencana pemerintah daerah untuk memanfaatkan gedung itu sebagai kantor beberapa SKPD yang tempatnya kurang representatif.

Kendati demikian, dikatakan Mahindra Putra pihaknya tetap berusaha agar bisa memanfaatkan bangunan yang merupakan milik pemerintah daerah itu. Agar bisa dipergunakan, pemerintah daerah merencanakan untuk saling ibah aset dengan RSUD Bangli yang merupakan aset pemerintah Provinsi Bali yang kini berstatus sebagai hak pakai. "Kami berencana untuk saling ibah aset antara eks rumah sakit dengan RSUD Bangli sekarang yang merupakan milik provinsi dan sekarang masih berstatus sebagai hak pakai oleh pemerintah daerah," katanya.

intah daerah," katanya.

Dijelaskan juga, apabila tidak melakukan saling ibah aset, pemerintah daerah hanya bisa meminjam gedung eks RSUD itu. Namun, waktunya sangat singkat. Jika waktu peminjaman itu sudah berakhir, secara otomatis pemerintah daerah harus kembali mencari tempat untuk SKPD yang gedungnya kurang representatif. Oleh sebab itu, saling ibah ini dianggap sebagai salah satu solusi.

Sesuai berita sebelumnya, gedung Eks RSUD ini direncanakan akan ditempati Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan dan Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah. (kmb.)

Edisi : Roby, 13 Mei 2015

Hal : 10





### Rebut Dana Perimbangan di Sektor Pariwisata

# DPRD Bali Mesti Bentuk Pansus

Denpasar (Bali Post) -

Sebagai daerah penyumbang devisa terbesar dari sektor pariwisata, selama ini Bali selalu mengeluh tidak mendapatkan dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sebab, dalam UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah hanya mengatur perimbangan keuangan itu bagi daerah yang memiliki sumber daya alam. Sementara Bali tidak memiliki sumber daya alam seperti pertambangan, minyak dan gas bumi, melainkan hanya memiliki adat, budaya dan selama ini telah menjadi daya tarik wisata.

Hal tersebut dirasakan tidak adil bagi Bali sehingga muncul wacana merevisi UU tersebut yang bergulir sejak lama termasuk merevisi UU nomor 64 tahun 1958 yang mengatur tentang Pembentukan Provinsi Bali, NTB, NTT. Kini rencana revisi kedua UU itu sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Untuk itu, DPRD Bali diharapkan mampu mengambil langkah strategis menjaring berbagai masukan dari berbagai elemen di Bali dalam bentuk pansus untuk

tokoh masyarakat, LSM, anggota DPR RI dan DPD RI, pimpinan daerah serta DPRD kabupaten/kota di Bali. Pansus juga merumuskan substansi apa saja yang perlu dimasukkan dalam revisi kedua UU itu termasuk berapa besaran persentase dana perimbangan dari sektor pariwisata yang diinginkan Bali. "Substansi untuk revisi UU ini harus kita matangkan dulu di Bali supaya tidak seperti pembahasan UU Desa yang sempat pro dan kontra," ujar politisi Golkar asal Buleleng itu.

memperkuat perjuangan wakil rakyat dari Bali di DPR RI atas revisi kedua UU itu.

"DPRD Bali perlu segera membentuk pansus mengawal proses revisi kedua UU itu yang telah masuk prolegnas. Rumusan pansus ini akan menjadi bahan perjuangan revisi di prolegnas," kata Wakil Ketua DPRD Bali, Sugawa Korry, Selasa (12/5) kemarin.

Nantinya tugas pansus ini menggali dan menyerap masukan serta aspirasi berbagai komponen seperti akademisi,

Ia mengatakan UU nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali, NTB, NTT saling berkaitan dengan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jika ingin merevisi materi UU 33/2004, maka dalam revisi UU 64/1958 harus dimasukkan dulu menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung signifikan dalam pembangunan ekonomi dan mengedepankan pariwisata berbasis budaya dan lingkungan. Dengan demikian, Bali bisa mendapatkan perimbangan keuangan dari sektor pariwisata yang akan digunakan kembali untuk menjaga adat, budaya, dan lingkungan Bali yang menjadi daya tarik budaya Bali.

Selama ini, Bali hanya mendapatkan Dana Alokasi Umum

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang nilainya sangat kecil dan tidak seimbang dengan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pelestarian adat dan budaya Bali yang menghasilkan devisa dan dikontribusikan ke pusat. Contohnya untuk membiaya subak saja dan bantuan desa adat dana yang keluar mencapai ratusan miliar rupiah tiap tahun dari dana APBD. "Kita membutuhkan biaya besar untuk pelestarian adat dan budaya yang selama ini dibiayai lewat dana APBD Bali. Kalau perjuangan kita di UU 33 tahun 2004 ini berhasil, kita mendapatkan dana bagi hasil dari pariwisata, dana APBD kita yang selama ini untuk desa adat dan subak bisa dialihkan ke program lainnya. Seperti percepatan pembangunan Bali Utara, terutama infrastruktur," jelasnya.(wid)

Edisi : Raby 13 Mei 2015

Hal  $: \mathcal{I}$ 





## Soal Reklamasi Teluk Benoa

# DPD Berjuang Cabut Perpres 51/2014

"Saya juga dapat keluhan dari berbagai elemen masyarakat Bali terhadap persoalan kebudayaan atau adat-istiadat seakanakan tereliminir oleh pembangunan modernisasi."

Hardi Slamet Hood Ketua Komite III DPD-RI



mangupura (Ban Post) -

Sikap Ketua Komite III DPD-RI Hardi Slamet Hood sangat tegas soal reklamasi Teluk Benoa. Ia menyatakan menolak reklamasi dan akan berjuang agar Perpres 51/2014 yang melegalkan reklamasi Teluk Benoa dicabut. Penegasan itu disampaikan Hardi Slamet Hood, Selasa (12/5) malam kemarin.

Ia mengungkapkan, Komite III DPD-RI akan menyampaikan hal itu kepada pimpinan DPD. Selanjutnya pihaknya minta kepada pimpinan agar bersurat kepada Presiden Jokowi supaya mencabut Perpres 51/2014.

"Setidak-tidaknya ditinjau kembali dan dirundingkan kembali menjadi keputusan terbaik. Selain itu keputusan tersebut harus memenuhi hak kedaulatan kebudayaan dan rakyat," ujar Hardi.

Dia juga menegaskan komitmennya untuk berjuang supaya Perpres itu dicabut. "Saya juga dapat keluhan dari berbagai elemen masyarakat Bali terhadap persoalan kebudayaan atau adat-istiadat seakan-akan tereliminir oleh pembangunan modernisasi," ujarnya.

Ia mengakui telah melihat dan mendengar aspirasi masyarakat terkait reklamasi Teluk Benoa. Banyak yang melakukan protes terhadap rencana tersebut. Karenanya, sudah sewajarnya kebijakan atau keputusan pemerintah terkait hal tersebut ditinjau kembali.

Hardi melihat proses pembangunan apa pun dilakukan, baik di Bali maupun tempat lain, harus pro-rakyat. Di samping itu, harus ada skenario mempertahankan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. "Misalkan kita sangat menge-

Edisi

: Rabu, 13 Mai 2015

Hal

. 1

1

#### Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali



#### Bali Post



sambungan . . .

tahui di Bali ini, kedaulatan adatnya menjadi bagian tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia berharap apa pun yang dilakukan di Bali harus menghindari ketersinggungan atau perbedaanperbedaan yang ada di masyarakat. Apalagi berkaitan dengan kebudayaan dan adat-istiadat.

"Inilah saya kira jalan yang harus ditempuh supaya Bali dengan ciri khas kekuatan kedaulatan adat itu menjadi bagian tak terpisahkan daripada kekuatan membangun Bali itu sendiri.

Hal. 23 Kedaulatan Kebudayaan

#### Kedaulatan Kebudayaan

#### Dari Hal. 1

Bagi kami di Komite III yang salah satunya bidang adalah kebudayan, tentu terus memperjuangkan bahwa Bali memiliki kedaulatan kebudayaan itu dan terus dapat dilestarikan. Sepanjang keputusan pemerintah dianggap melanggar daripada adatistiadat itu sebaiknya dicabut," ujarnya.

Terkait keluhan-keluhan investasi besar yang tidak memperhatikan kekuatan pelakupelaku ekonomi daerah, menurut Hardi, akan menggerus proses kebudayaan itu sendiri. Oleh karena itu, Bali sebagai ciri khas kekuatan kebudayaan menjadi modal besarnya, harus dijaga. "Saya berpikir Komite III mempunyai sikap untuk memperjuangkan dan menyelesaikan masalah ini (reklamasi - red) dengan Bapak Presiden Jokowi dan berharap Presiden mencabut perpres tersebut," tegasnya yang didampingi sejumlah anggota Komite III DPD-RI. (kmb36)

Edisi : <u>plabu, 13 Mai 2015</u>

Hal : (

2